

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Analisis Kebijakan Kepala Madrasah

1. Pengertian Kebijakan Kepala Madrasah

Menurut James E. Anderson yang dikutip oleh Irfan Islamy memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian lain mengenai kebijakan dikemukakan oleh M. Irfan Islamy. Ia memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.¹

Kebijakan yang dikemukakan oleh Irfan Islamy ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini tidak cukup hanya ditetapkan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut juga harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Terakhir, pengertian Irfan Islamy meniscayakan adanya kepentingan bagi seluruh masyarakat yang harus dipenuhi oleh suatu kebijakan dari pemerintah.

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan

¹ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, Hlm. 20.

pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Dengan demikian siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Budi Winarno menyatakan adanya keharusan untuk membedakan antara apa yang ingin dilaksanakan pemerintah dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di lapangan. Hal ini menjadi penting karena kebijakan bukan hanya sebuah keputusan sederhana untuk memutuskan sesuatu dalam suatu momen tertentu, namun kebijakan harus dilihat sebagai sebuah proses. Untuk itulah pengertian kebijakan sebagai suatu arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara lain adalah tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*), dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*).²

Menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh M. Hasbullah, bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.³

Menurut Carl W. Patton dan David S. yang dikutip oleh Riant Nugroho mengatakan bahwa analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analisa kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba terbatas. Analisa kebijakan yang baik adalah analisis kebijakan yang bersifat preskriptif karena perannya memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif. Sedangkan dari E.S. Quade mengemukakan asal muasal analisa kebijakan disebabkan banyaknya

² Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 19-21.

³ M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan kondisi Objektif pendidikan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015. Hlm. 38.

kebijakan yang tidak memuaskan. Begitu banyak kebijakan yang tidak memecahkan masalah, kebijakan bahkan menciptakan masalah baru.⁴

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.⁵

Penelitian kebijakan sedapat mungkin melihat berbagai aspek dari kebijakan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan serta masalah-masalah yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan menjadi fokus dari analisis kebijakan.

Sudarwan Danim di dalam bukunya menyatakan bahwa proses penelitian kebijakan pada hakikatnya merupakan penelitian yang dimaksudkan guna melahirkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dalam rangka pemecahan masalah sosial. Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk mendukung kebijakan.⁶

Sudarwan Danim secara jelas menyatakan hasil yang ingin dicapai dari penelitian kebijakan yaitu menghasilkan rekomendasi yang mungkin diperlukan pembuat kebijakan dalam rangka pemberian solusi terhadap masalah-masalah sosial. Selain itu, penelitian kebijakan perlu dipahami sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan itu sendiri.

Menurut Wahjosumidjo yang dikutip oleh Jamal Ma'mur, kepala sekolah adalah seorang fungsional guru yang diberi tugas untuk suatu

⁴ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik (Formulasi Implementasi dan Evaluasi)*, Gramedia, Jakarta, 2003. hlm. 83-88.

⁵ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, cet. ke-IV, hlm. 95-97.

⁶ Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, cet. ke-III, hlm. 20-23.

madrassah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Sedangkan Rahman dkk. Member definisi bahwa kepala sekolah adalah adalah seorang guru yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural (kepala sekolah) di sekolah.⁷

Kepala madrasah disebut juga kepala sekolah dalam lembaga pendidikan umum. Dalam kacamata menejemen, kepala sekolah adalah manajer dalam organisasi sekolah yang harus menjalankan 5 fungsi manajemen. Menurut Fayol, ke-5 fungsi tersebut adalah: *planning, organizing, commanding, coordinating* dan *controlling*. Sedangkan menurut L. Gullick, ada 7 fungsi kepala sekolah yaitu: *planning organizing, staffing, directing, coordinating, reporting* dan *budgetting*.⁸

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kepala sekolah/madrassah adalah guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber yang ada di sekolah/madrassah, sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama.

Kepala sekolah atau kepala madrasah adalah penanggung jawab semua kegiatan adminitrasi dan edukasi di sekolah. Tugas-tugasnya adalah sebagi berikut:

- a. Merencanakan, menyusun, membimbing dan mengawasi kegiatan administrasi pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- b. Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan dari unit-unit kerja yang ada di lingkungan sekolah/madrassah.
- c. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang tua siswa, lembaga-lembaga terkait dan masyarakat.

⁷ Jamal Makmur, *Tips Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, DIVA Press, Yogyakarta, 2012 . hlm. 17.

⁸ Fathul Mufid, *Eduaksia, Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Manajemen Ketenagaan Pendidikan* 2009. STAIN Kudus press, 2009. Hlm 124.

- d. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan di sekolah/madrasah kepada atasan langsungnya.⁹

Kepala madrasah juga memiliki standar, antara lain sebagai berikut :

- a. Berstatus sebagai guru (sesuai jenjang).
- b. Memiliki kompetensi akademik dan kompetensi sebagaimana pembelajaran sesuai dengan poerundang-undangan yang berlaku.
- c. Memiliki pengalaman mengajar setidaknya 3 tahun untuk TK/RA, dan 5 tahun untuk jenjang seterusnya.
- d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan wirausaha di bidang pendidikan.¹⁰

Melihat beratnya tanggung jawab sebagai kepala madrasahbanya syarat yang diajukan para pakar jiwa seorang ingin menjadi kepala sekolah, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Daryanto

- 1) Akseptabilitas

Akseptabilitas yaitu dukungan riil dari komunitas yang dipimpinnya, artinya keberadaannya didukung dan diterima secara bulat.

- 2) Kapabilitas

Kapabilitas yaitu segala hal yang menyangkut kompetensi atau kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan. Kepala sekolah harus mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki orang-orang yang dipimpinnya.

- 3) Integritas

Integritas dapat diartikan sebagai komitmen moral dan prinsip berpegang teguh pada aturan main yang telah disepakati

⁹ Fathul Mufid, *Op. Cit.*, hlm 124.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 125.

sesuai aturan dan norma yang berlaku, terutama dalam dunia pendidikan.¹¹

b. Menurut Sudarwan

Ada lima kemampuan dasar kepala sekolah, yaitu:

- 1) Memahami visi organisasi dan memiliki visi kerja yang jelas.
- 2) Mampu dan mau bekerja keras.
- 3) Tekun dan tabah dalam bekerja dengan bawahan, terutama tenaga administrasi dan akademiknya.
- 4) Memberikan layanan optimal dengan tetap tampil rendah hati.
- 5) Memiliki disiplin kerja yang kuat.

Sebagai pemimpin kewajiban menghidupkan organisasi melekat pada diri kepala sekolah, secara lebih jelas, Dedy Mulyasana merinci kewajiban kepala sekolah yang dikutip oleh Jamal Makmur yakni sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi ke dalam misi target mutu.
- b. Merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai.
- c. Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan sekolah/madrasah.
- d. Membuat rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk melaksanakan peningkatan mutu.
- e. Bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran sekolah/madrasah.
- f. Melibatkan guru dan komite dalam mengambil keputusan penting.
- g. Berkomunikasi untuk mendapatkan dukungan intensif dari orang tua siswa dan masyarakat.
- h. Menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- i. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa.

¹¹ Jamal Makmur, *Op. Cit.*, hlm. 18-19.

- j. Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum.
- k. Merencanakan dan melaksanakan program supervise, serta memanfaatkan supervisi untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah.
- l. Meningkatkan mutu pendidikan.
- m. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan.
- n. Memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah/madrasah.
- o. Membantu, membina dan mempertahankan lingkungan sekolah/madrasah serta program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar siswa dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan.
- p. Menjamin manajemen organisasi dan pengoprasian sumberdaya sekolah/madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sehat, efisien dan efektif.
- q. Menjalinkan kerjasama dengan wali/orangtu siswa dan masyarakat serta komite sekolah/madrasah dalam menanggapi kebutuhan dan kepentingan yang beragam.
- r. Kepala sekolah/madrasah dapat mendelegasi tugas dan kewenangan kepada wakilnya sesuai dengan bidangnya.¹²

Sebagai seorang pemimpin fungsi dan tugas kepala sekolah/madrasah sangat kompleks demi terwujudnya sekolah yang berkualitas. E. Mulyasa memaparkan fungsi dan tugas kepala sekolah/madrasah sebagai berikut;

- a. Sebagai pendidik (*educator*)

Sebagai pendidik, kepala sekolah/madrasah meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya, menciptakan iklim

¹² Jamal makmur, *Op. Cit.*, 29-31

sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, melaksanakan model pembelajaran yang menarik serta melaksanakan program akselerasi bagi siswa yang cerdas di atas rata-rata.

b. Sebagai manajer

Sebagai manajer, kepala sekolah/madrasah memberdayakan tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus mampu menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik.¹³

c. Sebagai administrator

Kepala sekolah/madrasah juga bertugas dan berfungsi mengelola kurikulum, siswa, personalia, sarana prasarana, kearsipan dan keuangan.

d. Sebagai supervisor

Kepala sekolah/madrasah selalu memperhatikan prinsipnya sebagai supervisor seperti hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan heirarkis, dilaksanakan secara demokratis. Berpusat pada tenaga pendidik dan kependidikan, dilakukan berdasarkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu kepala sekolah juga kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu mensinkronkan semua aspek pendidikan baik dari dimensi lembaga maupun dimensi individu agar perilaku seluruh warga sesuai dengan yang diharapkan demi terciptanya tujuan supervisi.¹⁴

e. Sebagai leader

Sebagai leader kepala sekolah/madrasah memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga

¹³ M. Sobry Sutikno. *Op. Cit.*, hlm. 124.

¹⁴ Masrukhin. *Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Islam (Urgensi Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Pengajaran Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)*, Stain Kudus Press, 2009, hlm. 66.

kependidikan, membuka komunikasi 2 arah serta mendelegasikan tugas. Kepala sekolah juga harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya perubahan serta mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik.¹⁵

f. Sebagai inovator

Sebagai inovator, kepala sekolah/madrasah juga harus melakukan inovasi-inovasi dan ide-ide baru demi kemajuan sekolah/madrasah yang dipimpinnya. Ide kreatif dapat digunakan untuk menyusun perencanaan, menyusun organisasi sekolah, memberikan pengarahan, mengatur pembagian kerja, dan mengelola kepegawaian yang ada di lingkungan sekolah.

g. Sebagai motivator

Sebagai motivator, kepala sekolah/madrasah memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya agar dalam pencapaian tujuan itu menjadi lebih mudah.¹⁶

Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas maka dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa kebijakan kepala madrasah adalah adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang kepala madrasah dengan melalui pertimbangan terlebih dahulu guna merespon atau menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam suatu madrasah.

2. Peran Analisis Kebijakan Kepala Madrasah

Peran analisis kebijakan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh public, bukan asal menguntungkan pengambil

¹⁵ M. Sobry Sutikno. *Op Cit.*, hlm. 122.

¹⁶ Jamal Makmur, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

kebijakan. Oleh karena itu analisis kebijakan harus memiliki kecakapan-kecakapan sebagai berikut:

- a. Mampu cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral.
- b. Mempunyai kemampuan analisis multidisiplin
- c. Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil.
- d. Mampu menghindari kegiatan *toolbox* untuk menganalisa kebijakan, melainkan Mampu menggunakan metode yang sederhana dan tepat.
- e. Mampu mengatasi ketidakpastian
- f. Mampu mengemukakan dengan angka (tidak hanya asumsi asumsi kualitatif).
- g. Mampu membuat rumusan analisa yang sederhana tapi jelas.
- h. Mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan.
- i. Mampu meletakkan diri dalam posisi orang lain.
- j. Mampu menahan diri hanya untuk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan.
- k. Mampu tidak saja mengatakan “Ya” atau “Tidak” pada usulan yang masuk namun juga mampu memberikan definisi dan analisa dari usulan tersebut.
- l. Mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional dan sama sekali komplit.
- m. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi.
- n. Mempunyai etika profesi yang tinggi.¹⁷

3. Jenis-Jenis Analisis Kebijakan Kepala Madrasah

Menurut Patton dan Sawitcky yang dikutip oleh Riant Nugroho, jenis-jenis analisis kebijakan dibagi menjadi 2 :

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 85-86.

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ialah analisis yang hanya memberikan gambaran terhadap suatu kebijakan. Jadi analisis ini tidak memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan yang dianalisa sehingga hanya bersifat mendiskripsikan suatu kebijakan tertentu dalam suatu madrasah.

b. Analisis Preskriptif

Analisis Preskriptif yaitu analisis yang menekankan pada rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan yang dianalisa.¹⁸ Jadi analisis preskriptif ini selain memberikan gambaran tentang sebuah kebijakan, juga memberikan saran atau rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dianalisa sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya.

Hasil yang ingin dicapai dari penelitian kebijakan yaitu menghasilkan rekomendasi yang mungkin diperlukan pembuat kebijakan dalam rangka pemberian solusi terhadap masalah-masalah sosial. Selain itu, penelitian kebijakan perlu dipahami sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan itu sendiri.

4. Model Proses Analisis Kebijakan Kepala Madrasah

Proses analisis kebijakan sebaiknya dipahami dari aspek perumusannya. Berkaitan dengan rumusan kebijakan, ada 4 elemen yang saling berkaitan, yaitu : Faktor lingkungan yang mempengaruhi, Isi kebijakan, Perumusan masalah dan alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Akibat yang terjadi.¹⁹

a. Factor lingkungan yang mempengaruhi.

Lingkungan adalah unsur yang sangat berpengaruh terhadap suatu madrasah. Hal itu terjadi karena masing masing madrasah berada dalam

¹⁸ Riant Nugroho, *Op. Cit.* hlm 87-88

¹⁹ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm 35

lingkungan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Contohnya Madrasah yang berada dalam lingkungan pedesaan tentunya akan sangat berbeda dengan madrasah yang berada di lingkungan perkotaan, madrasah yang berada di lingkungan masyarakat ekonomi menengah ke bawah tentunya juga sangat berbeda dengan madrasah yang berada di lingkungan masyarakat ekonomi menengah ke atas.

Dengan adanya lingkungan yang demikian tentunya memungkinkan masing-masing kepala madrasah mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

b. Isi kebijakan

Dalam merumuskan kebijakan, isi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan itu sendiri, karena didalamnya terdapat maksud dan tujuan kebijakan tersebut diambil sehingga kepala madrasah harus dapat merumuskannya sesuai dengan situasi, kondisi dan lingkungan yang ada di sekitar madrasah.

c. Perumusan masalah dan alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Perumusan masalah dan alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan ini juga harus disesuaikan dengan isi, maksud dan tujuan serta lingkungan suatu madrasah karena jika alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan itu terbatas atau tidak tersedia maka kebijakan yang telah diambil akan susah untuk dilaksanakan dengan baik.

d. Akibat yang terjadi.

Akibat yang terjadi juga harus diprediksi terlebih dahulu, sehingga dapat diambil langkah-langkah strategis guna merespon akibat yang timbul, baik itu akibat yang negatif maupun positif.

B. Pengembangan Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum berasal dari kata *kurir* (pelari) dan *curere* yang berarti tempat berpacu, dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok yaitu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dan tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan demikian implikasinya terhadap praktik pengajaran, yaitu setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran yang dikuasainya.

Menurut Hamdani, ada tiga pengertian kurikulum, yaitu :

- a. Kurikulum adalah program pendidikan yang terdiri atas beberapa mata pelajaran yang harus diambil oleh anak didik pada suatu jenjang sekolah.
- b. Kurikulum adalah semua pengalaman yang diperoleh anak selama di sekolah.
- c. Kurikulum adalah rencana belajar siswa, agar mencapai tujuan yang ditetapkan.²¹

²⁰ Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2011, hlm 2.

²¹ Hamdani, *Dasar-dasar Kependidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011. Hlm. 97-98

Istilah kurikulum pada dasarnya tidak hanya terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Bahkan, Harlod B. Albery yang dikutip oleh Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada semua siswa dibawah tanggungjawab sekolah. Sehingga kurikulum tidak dibatasi pada kegiatan didalam kelas tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa di luar kelas.²²

Pendapat senada dan menguatkan pengertian tersebut dikemukakan oleh Saylor, Alexander, dan Lewis menganggap kurikulum sebagai upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah.²³

Nana Syaodih Sukmadinata, mengemukakan pengertian kurikulum ditinjau dari tiga dimensi yaitu sebagai ilmu, sebagai system dan sebagai rencana. Kurikulum sebagai ilmu dikaji konsep, asumsi, teori-teori dan prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Kurikulum sebagai sistem dijelaskan kedudukan kurikulum dan hubungannya dengan sistem-sistem lain, komponen-komponen kurikulum, manajemen kurikulum, jenjang, jenis pendidikan dan lain sebagainya. Kurikulum sebagai rencana diungkap beragam rencana dan rancangan. Rencana bersifat menyeluruh untuk semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.²⁴

Istilah kurikulum mempunyai 4 dimensi pengertian yang saling berhubungan antara lain : (1) kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, (2) kurikulum sebagai rencana tertulis, (3) kurikulum sebagai suatu kegiatan, (4) kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. ²⁵

²² Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Op. Cit.* Hlm. 2.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, Hlm 6.

²⁵ *Ibid*

Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dengan program kurikuler tersebut, sekolah atau lembaga pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi siswa untuk berkembang. Itu sebabnya, kurikulum disusun sedemikian rupa yang memungkinkan siswa melakukan beraneka ragam kegiatan belajar. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran, namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti : bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan sekolah, perpustakaan, karyawan tata usaha, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain.²⁶

Pengertian kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan ide pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Kurikulum dikaitkan dengan dimensi rencana adalah sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dikaitkan dengan dimensi aktivitas memandang kurikulum merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum dikaitkan dengan dimensi hasil memandang kurikulum sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut.

Dalam kamus Webster, kurikulum diartikan dalam dua macam :

- a. Sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari murid di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu.

²⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, PT. Remaja Rosdakayra, Bandung, 2010. Hlm. 10.

- b. Sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau departemen.²⁷

Apabila ditelusuri lebih jauh, kurikulum mempunyai berbagai macam arti yaitu :

- a. Sebagai rencana pengajaran
- b. Sebagai rencana belajar murid
- c. Sebagai pengalaman belajar yang diperoleh murid dari sekolah

Dari pengertian tersebut, kurikulum didefinisikan sebagai suatu bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang harus dilaksanakan dari tahun ke tahun.

Dengan demikian kurikulum bisa berwujud mata pelajaran lengkap dengan alokasi waktu dalam KBM dan gurunya, RPP, prota, silabus, promes, evaluasi dan lain-lain.

Adapun pandangan atau tanggapan yang sampai saat ini masih lazim dipakai dalam dunia pendidikan di negara kita adalah kurikulum merupakan suatu rencana tertulis yang disusun, guna memperlancar proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua dimensi kurikulum. Dimensi pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, sedangkan dimensi kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

²⁷ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, Rosda, Bandung, 2013. Hlm. 20.

²⁸ *Ibid.*, hlm 22.

2. Fungsi Kurikulum

Menurut Alexander Inglis dalam bukunya *Principle of Secondary education* yang dikutip oleh Oemar Hamalik, fungsi kurikulum adalah penyesuaian, pengintegrasian, preferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostic.²⁹

Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orangtua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar.

- a. Bagi sekolah yang bersangkutan
 - 1) Sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 - 2) Sebagai pedoman dalam mengatur segala kegiatan pendidikan setiap hari.
- b. Bagi guru

Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan program pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan atau tujuan sekolah dimana guru tersebut mengajar. Oleh karena itu, penguasaan kurikulum bagi guru merupakan suatu hal yang mutlak dan menjadi kewajibannya.

Seorang guru kelas dapat mengembangkan kurikulum kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi hanya terbatas pelaksanaannya dalam kelasnya saja. Jadi tidak menerima input dari guru lainnya baik pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan gagasan-gagasan baru.³⁰

²⁹ Oemar Hamalik, *Op. Cit.* Hlm. 95

³⁰ *Ibid.* hlm. 104

c. Bagi kepala sekolah

- 1) Sebagai pedoman dalam memperbaiki situasi belajar sehingga lebih kondusif dan menunjang situasi belajar ke arah yang lebih baik.
- 2) Sebagai pedoman dalam memberikan bantuan kepada pendidik dalam memperbaiki situasi belajar.
- 3) Sebagai pedoman dalam mengembangkan kurikulum serta dalam mengadakan evaluasi kemajuan kegiatan pembelajaran.
- 4) Untuk menyusun perencanaan dan program sekolah.
- 5) Untuk mengukur keberhasilan program pendidikan disekolah yang ia pimpin.

d. Bagi pengawas (Supervisor)

Bagi pengawas, kurikulum dijadikan sebagai pedoman, patokan atau ukuran dalam menetapkan bagian mana yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dalam usaha pelaksanaan bimbingan kerah yang tepat dalam pelaksanaan di lapangan.

Kurikulum juga berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi. Dengan demikian, dalam proses pengawasan para pengawas dapat menentukan apakah program sekolah yang dilakukan sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum atau belum.

e. Bagi sekolah atau madrasah di atasnya

Kurikulum SD atau MI, berfungsi bagi penyusunan kurikulum SMP atau MTS, kurikulum SMP atau MTS berfungsi bagi penyusunan kurikulum SMA atau MA dan seterusnya.

f. Bagi masyarakat dan pengguna lulusan

Dengan mengetahui kurikulum tingkat satuan pendidikan, masyarakat dan pengguna lulusan, dapat ikut memberi bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak orangtua. Masyarakat dan pengguna lulusan dapat pula memberikan kritik atau saran agar lebih serasi dengan kebutuhan masyarakat.³¹

g. Bagi Siswa

1) Fungsi penyesuaian.

Fungsi penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat menyesuaikan diri dengan lingkungan baik fisik maupun social.

2) Fungsi integrasi

Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh sehingga dapat berinteraksi dengan masyarakat.

3) Fungsi diferensiasi

Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan siswa baik psikis maupun fisik.

4) Fungsi persiapan

Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu

³¹ Sholeh Hidayat. *Op. Cit.* hlm. 20

mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya.

5) Fungsi pemilihan

Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kepada siswa untuk memilih program program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

6) Fungsi diagnostik

Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan (potensi) dan kelemahan yang dimilikinya.³²

3. Peranan Kurikulum

Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah/madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Peranan tersebut antara lain:

a. Peranan konservatif

Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda.

b. Peranan kreatif

Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Kurikulum harus mengandung hal-hal

³² Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Op. Cit.*, hlm. 10.

yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan baru, kemampuan baru serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya.

c. Peranan kritis dan evaluatif

Peranan ini tidak hanya mewariskan nilai budaya tetapi juga harus terlibat aktif berpartisipasi dalam control atau sistem social. Nila-nilai social yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau peneympurnaan-penyempurnaan.³³

Ketiga peranan kurikulum diatas harus berjalan secara seimbang dan harmonis. Jika tidak akan menyebabkan peranan kurikulum persekolahan menjadi tidak optimal. Ketiga peranan tersebut menjadi tanggungjawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan mulai dari guru, kepala sekolah, pengawas, orangtua, siswa dan masyarakat. Dengan demikian pihak-pihak yang terkait dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

4. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum harus dikelola secara professional dengan menempatkan personil-personil berkualitas tinggi agar bisa merespon dan mengantisipasi perubahan yang terus terjadi. Hal ini harus dilakukan jika anggaran madrasah cukup untuk menggaji banyak personil. Jika tidak, sesuaikan saja dengan kemampuan. Jika memang hanya ada satu orang, orang tersebut harus mempunyai wawasan luas, spirit kerja tinggi dan etos inovasi yang tiada henti.

Setiap saat, kurikulum bisa berubah sesuai dengan dinamika zaman. Oleh karena itu, manajemen kurikulum harus dinamis,

³³ *Ibid.*, hlm 11.

responsive dan antisipatif. Ia tidak boleh stagnan, karena akan membanyakan proses adaptasi dan responsi anak didik terhadap tantangan zaman yang terus berubah. Memang, sebaiknya tetap ada kurikulum yang fundamental dan tidak boleh berubah karena diperlukan setiap saat dalam pembentukan karakter dan religiusitas.³⁴

5. Model-Model Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum tidak lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berfikir, sistem nilai, proses pengembangan, kebutuhan masyarakat maupun arah program pendidikan. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu aktif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan dan mengevaluasi. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan.

Dalam pengembangan kurikulum dapat diidentifikasi berdasar basis apa yang akan dicapai dalam kurikulum tersebut, seperti alternatif yang menekankan pada kebutuhan mata pelajaran, peserta didik dan lain-lain. Oleh karena itu pengembangan kurikulum perlu dilakukan berlandaskan pada teori yang tepat agar kurikulum yang dihasilkan bisa efektif.

Adapun model-model pengembangan kurikulum antara lain:

a. Model Ralp Tyler

Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Ralp Tyler yaitu:

- 1) Menentukan tujuan pendidikan.
- 2) Menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan.
- 3) mengorganisasikan pengalaman belajar.
- 4) Menentukan evaluasi pembelajaran.

³⁴ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan*, Diva Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 90-91.

b. Model administrative

Model pengembangan kurikulum yang paling awal dan sangat dikenal adalah model administrative karena model ini menggunakan prosedur “garis-staf” atau garis komando dari atas ke bawah.³⁵ Pengembangan kurikulum model ini sering disebut dengan *top down* yang artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum.

Selanjutnya membentuk suatu tim atau komisi untuk mengembangkan kurikulum yang didukung oleh ahli pendidikan, kurikulum, disiplin ilmu, tokoh masyarakat, tim pelaksana pendidikan dan pihak dunia kerja. Tim ini bertugas untuk mengembangkan konsep-konsep dan landasan umum, rujukan, maupun strategi pengembangan kurikulum.

Kurikulum yang sudah selesai disusun kemudian diperiksa dan diperbaiki oleh tim pengarah. Setelah diperbaiki atau disempurnakan, kurikulum tersebut perlu diujicobakan secara nyata di beberapa sekolah yang dianggap representative. Supaya kegiatan ujicoba tersebut bisa menghasilkan masukan yang efektif maka diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

c. Model Grass Root

Inisiatif dalam pengembangan kurikulum model ini berada ditangan guru sebagai pelaksana kurikulum disekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus.³⁶

³⁵ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, PT Remaja Rosda karya, Bandung, 2014. Hlm. 138.

³⁶ Zainal Arifin, *Op.Cit.* Hlm. 139.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model pengembangan kurikulum ini, yaitu:

- 1) Guru harus mempunyai kemampuan yang professional.
- 2) Guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum.
- 3) Guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi.
- 4) Seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman gurudan akan menghasilkan consensus tujuan tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana.

Model pengembangan ini dapat dikembangkan dalam lingkup luas maupun dalam lingkup yang sempit. Dapat berlaku untuk bidang studi tertentu atau sekolah tertentu dan dapat pula digunakan untuk beberapa sekolah yang lebih luas.

d. Model Demonstrasi

Dalam model pengembangan kurikulum ini, sekelompok guru dari 1 sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melaksanakan suatu uji coba atau eksperimen suatu kurikulum. Mereka melakukan penelitian atau pengembangan untuk menghasilkan suatu model kurikulum. Pengembangan model ini biasanya diprakarsai oleh departemen pendidikan dan dilakukan oleh kelompok guru dalam rangkian inovasi dan perbaikan suatu kurikulum.

e. Model Miller Seller

Model ini memiliki tahapan-tahapan antara lain:

- 1) Klarifikasi orientasi kurikulum.

Orientasi ini merefleksikan pandangan filosofis, psikologis, dan sosiologis terhadap kurikulum yang seharusnya dikembangkan.

- 2) Pengembangan tujuan

Yaitu mengembangkan tujuan dari yang bersifat umum menuju yang lebih khusus.

3) Identifikasi model mengajar

Pada tahapan ini, pelaksana kurikulum harus mengidentifikasi strategi mengajar yang akan digunakan yang disesuaikan dengan tujuan dan orientasi kurikulum.

4) Implementasi

Implementasi dilaksanakan dengan memperlihatkan komponen-komponen program studi, identifikasi sumber, peranan, pengembangan profesional, menetapkan waktu, komunikasi dan sistem monitoring.

f. Model Taba

Model ini merupakan modifikasi dari model Tyler, modifikasi tersebut penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Guru merupakan factor utama dalam usaha pengembangan kurikulum sehingga guru harus penuh aktif dalam pengembangan kurikulum.

g. Model Beauchamp

Dalam model ini, pengembangan kurikulum harus meliputi 5 tahap, yaitu:

- 1) Menentukan wilayah atau arena.
- 2) Menetapkan personalia, yaitu menentukan siapa saja yang turut serta dalam pengembangan kurikulum.
- 3) Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum.

Beauchamp membagi keseluruhan kegiatan ini dalam lima langkah, yaitu:

- a) Membentuk tim pengembang kurikulum.
- b) Mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang ada yang sedang digunakan.
- c) Studi peninjauan tentang kemungkinan penyusunan kurikulum baru.

- d) Merumuskan criteria-kriteria bagi penentuan kurikulum baru.
- e) Penyusunan dan penulisan kurikulum baru.
- 4) Implementasi kurikulum, yaitu melaksanakan kurikulum yang telah direncanakan yang memerlukan kesiapan dari guru, siswa, fasilitas, bahkan biaya.
- 5) Evaluasi kurikulum

Langkah ini minimal mencakup 4 hal, yaitu:

- f) Evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh gur.
- a) Evaluasi desain kurikulum.
- b) Evaluasi hasil belajar siswa.
- c) Evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum.³⁷

h. Model Teknologis

Model teknologis ini terdiri dari 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis system, dan model berdasarkan computer.

Model analisis tingkahlaku memulai kegiatannya dengan jalan melatih kemampuan anak mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks secara bertahap. Model analisis system memulai kegiatannya dengan jalan menjabarkan tujuan-tujuan secara khusus, kemudian menyusun alat-alat ukur untuk menilai keberhasilannya, selanjutnya mengidentifikasi sejumlah factor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraannya. Model berdasarkan computer memulai kegiatannya dengan jalan mengidentifikasi sejumlah unit kurikulum lengkap dengan tujuan-tujuan pembelajaran khususnya³⁸.

³⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangn Kurikulum Teori Dan Praktek*, PT Remaja Rosda Karya , Bandung, 2000. Hlm 164-165.

³⁸ Zainal arifin, *Op. Cit. Hlm. 143*

6. Komponen-komponen Pengembangan Kurikulum

Dalam pengembangan kurikulum, ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Komponen-komponen tersebut antara lain adalah, tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar dan evaluasi. Tiap komponen saling bertalian erat dengan komponen lainnya. Tujuan bertalian erat dengan bahan pelajaran, proses belajar mengajar dan penilaian.³⁹ Dalam keterangan lain, Dinn Wahyudin mengemukakan bahwa komponen dalam pengembangan kurikulum ada 4, yaitu Tujuan, isi, metode dan evaluasi.⁴⁰

a. Komponen Tujuan

Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalkan, sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila, maka tujuan yang diharapkan suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasila.

Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang spesifik. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu :

1) Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan ini bersifat paling umum dan yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, semua lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan rumusan itu.

³⁹ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993. Hlm. 3-4

⁴⁰ Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014, Hlm. 52.

Tujuan pendidikan nasional, bersumber dari sistem nilai Pancasila yang dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

2) Tujuan Institusional

Tujuan Institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah menempuh program di suatu lembaga pendidikan tertentu.

3) Tujuan Kurikuler

Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki siswa setelah mereka menyelesaikan mata pelajaran tertentu dalam suatu lembaga pendidikan tertentu.

4) Tujuan Instruksional (tujuan pembelajaran)

Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan.⁴¹

Tujuan pembelajaran ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu kognitif, afektif dan psikomotor:⁴²

a) Kognitif

⁴¹ Sholeh Hidayat, *Op.Cit.* Hlm 53

⁴² Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Op.Cit.* Hlm. 48.

Menurut Anderson dan Krathwohl, tujuan pendidikan dideskripsikan menjadi 6 kategori yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Kognitif meliputi pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi.

b) Afektif

Afektif meliputi penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi dan karakterisasi nilai.

c) Psikomotor.

Psikomotor meliputi persepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, menyesuaikan dan menciptakan.

Menurut Anderson dan Krathwohl yang dikutip oleh Suwanto tujuan pendidikan dideskripsikan menjadi 6 kategori yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan.⁴³

b. Komponen Isi atau Materi Pembelajaran

Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktifitas dan kegiatan siswa. Baik materi atau aktifitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

c. Komponen metode/Strategi

Strategi merupakan pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi

⁴³ Suwanto, *Pengembangan Tes Diagnostik Dalam Pembelajaran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. Hlm. 18.

mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat, isi kegiatan, proses dan sarana penunjang kegiatan.⁴⁴

Strategi merupakan hal penting yang harus ada dalam suatu kurikulum, karena untuk mencapai tujuan itu sangat diperlukan strategi atau metode. Strategi meliputi rencana, metode dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

d. Komponen Evaluasi

Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektifitas pencapaian tujuan. Evaluasi dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu:

1) Tes

Tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Sebagai alat ukur, Tes harus memiliki 2 kriteria yaitu validitas dan reliabilitas.

2) Non-tes

Non tes adalah alat yang digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, sikap, minat dan motivasi. Non tes ini biasanya dilakukan dengan cara observasi, studi kasus, wawancara, dan skala penilaian.⁴⁵

7. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum

a. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum

Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Berarti prinsip menunjukkan hal yang penting dan mendasar yang harus diperhatikan, memiliki sifat mengatur dan mengarahkan. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil, dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan

⁴⁴ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, Rosda Karya, Bandung, 2013, hlm. 3-4

⁴⁵ Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. *Op. Cit.*, hlm. 56-59

main yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Jadi prinsip pengembangan kurikulum merupakan asas, dasar, keyakinan, dan pendirian dalam mengembangkan kurikulum untuk mencapai tujuan secara benar.

b. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum

1) Prinsip Umum

Prinsip umum meliputi:

a) Prinsip relevansi atau kesesuaian

Artinya tujuan, isi dan proses belajar mengajar yang tercakup dalam kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum tidak hanya menyiapkan anak untuk kehidupannya sekarang, tapi juga yang akan datang.⁴⁶

b) Prinsip fleksibilitas

Artinya kurikulum harus lentur dalam pelaksanaannya.

c) Prinsip kontinuitas

Artinya kurikulum harus dikembangkan secara berkesinambungan.

d) Prinsip praktis atau efisiensi

Artinya kurikulum itu dapat dengan mudah diterapkan di lapangan.

e) Prinsip efektifitas

Artinya kurikulum itu harus selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai.

2) Prinsip Khusus

Prinsip ini adalah prinsip yang berlaku pada saat tertentu dan dalam keadaan tertentu. Prinsip ini juga merujuk

⁴⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Op. Cit*, Hlm. 150-151.

pada tujuan, isi, media/alat bantu, dan evaluasi. Dimana prinsip berbeda.⁴⁷

Selain prinsip-prinsip diatas, Oemar Hamalik menambahkan beberapa prinsip yaitu:

1) Prinsip Mutu

Artinya pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan.

2) Prinsip Keterpaduan

Artinya pelaksanaannya melibatkan semua pihak, baik di lingkungan sekolah maupun intersktoral.

3) Prinsip Berorientasi pada tujuan

Artinya pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional.⁴⁸

Dalam penyusunannya, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia dengan memperhatikan :

- a) Peningkatan iman dan taqwa
- b) Peningkatan akhlaq mulia
- c) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik
- d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan
- e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- f) Tuntutan dunia kerja
- g) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni
- h) Agama
- i) Dinamika perkembangan global.
- j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 64-71.

⁴⁸ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bumi Aksara, Jakarta, 2005. Hlm. 30-

8. Asas-Asas Pengembangan Kurikulum

Dalam mengembangkan kurikulum, perlu asas-asas yang kuat agar tujuan kurikulum tercapai dengan kebutuhan. Asas-asas tersebut yaitu :

a. Asas religius

Menurut Muhammad al-Thoumy al-Syaibani yang dikutip oleh Sholeh Hidayat kurikulum yang dikembangkan dan diterapkan berdasarkan nilai-nilai Ilahiyah diharapkan dan membimbing peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat.

Untuk mengembangkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia memerlukan asumsi-asumsi religius.

Asas religius merupakan prinsip yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai Ilahi yang tertuang dalam kitab suci yang bersisi nilai-nilai kebenaran yang universal, abadi dan bersifat futuristic.

b. Asas Filosofis

Asas ini pada hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan.⁴⁹ Asas juga ini berhubungan dengan filsafat dan tujuan pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, filsafat menjawab hal-hal mendasar bagi pengembangan kurikulum. Dengan kedudukannya yang begitu mendasar, filsafat mempunyai 4 fungsi :

- 1) Dapat menentukan arah tujuan pendidikan.
- 2) Dapat menentukan isi atau materi pembelajaran.
- 3) Dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan.

⁴⁹ Moh. Rosyid. *Kebudayaan dan pendidikan*, Idea Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 175.

⁵⁰ S. Nasution, *Op. Cit.* Hlm. 1.

4) Dapat menentukan tolok ukur keberhasilan proses pendidikan.

c. Asas Psikologis

Psikologi merupakan salah satu asas dalam pengembangan kurikulum yang harus dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum karena dalam proses pendidikan terjadi interaksi antarmanusia yaitu antara siswa dengan pendidik, dan juga antara siswa dengan manusia lainnya.

Asas psikologis berkaitan dengan perilaku manusia. Sehubungan dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, perilaku manusia menjadi landasan berkenaan dengan psikologi belajar dan psikologi perkembangan anak.

d. Asas Sosial Budaya

Asas Sosial Budaya berkenaan dengan penyampaian kebudayaan, proses sosialisasi individu dan rekonstruksi masyarakat. Asas inilah yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵¹

e. Asas organisatoris

Asas ini berkenaan dengan organisasi dan pendekatan kurikulum. Studi tentang kurikulum sering mempertanyakan tentang jenis organisasi atau pendekatan apa yang digunakan dalam pembahasan kurikulum tersebut.

f. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi kurikulum atau materi pengajaran, penggunaan strategi, metode, media dan evaluasi.⁵²

⁵¹ *Ibid.* Hlm 2

⁵² Sholeh Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 34-39.

Selain itu, dalam mengembangkan kurikulum juga harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas keimanan dan ketawaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Asas demokrasi pancasila.
- c. Asas keadilan dan pemerataan pendidikan.
- d. Asas keseimbangan, keserasian, dan keterpaduan.
- e. Asas hokum yang berlaku.
- f. Asas kemandirian dan pembentukan manusia mandiri.
- g. Asas nilai kejuangan bangsa.
- h. Asas pemanfaatan, pengembangan, penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵³

9. Evaluasi Kurikulum

a. Pengertian evaluasi kurikulum

Menurut Oliva yang dikutip oleh Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, evaluasi adalah alat untuk menentukan keputusan apa yang perlu dikembangkan dan untuk memberikan dasar efek-efek yang berkembang. Sedangkan Menurut Hamid Hasan, evaluasi adalah suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan, dapat berupa orang, benda, kegiatan, keadaan dan lain-lain. Sementara itu, Nana Sudjana mengemukakan bahwa evaluasi adalah proses penentuan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, yang dalam proses tersebut terdapat usaha mencari dan mengumpulkan data, sebagai dasar dalam menentukan nilai sesuatu yang menjadi obyek dari evaluasi.⁵⁴

Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek yang dilakukan secara

⁵³ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum.*, hlm. 15

⁵⁴ Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. *Op. Cit.* Hlm 108-109.

sistematik mulai dari awal perencanaan sampai akhir kegiatan dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁵

Menurut Hamdani, evaluasi adalah penilaian yang dilakukan secara profesional terhadap berbagai proses pelaksanaan kegiatan tertentu yang terukur, yang hasil pengukurannya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan perbaikan-perbaikan dan atau solusi alternative terhadap masalah yang menjadi penyebab hasil tindakan yang kurang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁶

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa evaluasi kurikulum merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan terhadap kurikulum secara keseluruhan baik yang bersifat makro maupun mikro, meliputi perencanaan, pengembangan komponen, implementasi serta hasil belajar.

b. Tujuan evaluasi kurikulum

Diadakannya evaluasi dalam kurikulum bertujuan untuk:

- 1) Perbaikan program.
- 2) Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak.
- 3) Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan.⁵⁷

c. Model-model evaluasi kurikulum

Model- model evaluasi kurikulum yang telah dikembangkan selama ini dapat digolongkan kedalam 5 rumpun yaitu:

⁵⁵ Masrukhin, *Pengembangan Sistem Evaluasi Pendidikan Agama Islam*, STAIN Kudus Press, Kudus, 2012, hlm. 1.

⁵⁶ Hamdani, *Op. Cit.* Hlm 111.

⁵⁷ Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. *Op. Cit.* hlm 110-111

1) *Measurement*

Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok.

2) *Congruence*

Evaluasi pada dasarnya adalah pemeriksaan kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai.

3) *Illumination*

Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, faktor lingkungan, kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar.

4) *Educational system evaluation*

Evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan criteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan *judgment*.

5) Model CIPP

Model ini menitikberatkan pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya : karakteristik peserta didik, lingkungan, tujuan program, peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri.⁵⁸ Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah criteria tertentu untuk akhirnya sampai pada deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.* Hlm 112-113

⁵⁹ Dinn Wahyudin, *Op.Cit* Hlm. 57.

10. Hambatan- hambatan pengembangan kurikulum

a. Pada guru

Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum disebabkan beberapa hal yaitu kurang waktu, kekurang sesuaian pendapat, baik dengan sesama guru maupun kepala sekolah & administrator karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri.

b. Dari masyarakat

Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah.

c. Masalah biaya

Untuk pengembangan kurikulum apalagi untuk kegiatan eksperimen baik metode isi atau sistem secara keseluruhan membutuhkan biaya yang sering tidak sedikit.⁶⁰

C. Mata Pelajaran Aqidah Akhlaq

1. Pengertian

Mata pelajaran akidah akhlak adalah mata pelajaran yang digunakan menumbuhkan dan meningkatkan keimanan siswa yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman siswa tentang aqidah dan akhlak Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas keimanan

⁶⁰ Nana Saodih, Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm 160.

dan ketakwaan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶¹

2. Tujuan

Mata pelajaran akidah akhlak bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan siswa yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman serta pengalaman siswa tentang aqidah dan akhlak Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.⁶²

3. Fungsi

Pendidikan Agama Islam. Fungsi pendidikan Agama Islam khususnya Mata pelajaran Aqidah Akhlak di madrasah berfungsi sebagai :

- a) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b) Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
- c) Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui aqidah akhlak.
- d) Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan pengalaman ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

⁶¹ Tim Perumus Cipayung, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Pengelolaan Kurikulum Berbasis Madrasah (Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Untuk Madrasah Tsanawiyah)*, Departemen Agama RI, 2003, hal. 1.

⁶² *Ibid.*

- e) Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya asing yang akan di hadapinya sehari-hari.
- f) Pengajaran tentang informasi dan pengetahuan keimanan dan akhlak, serta sistem dan fungsionalnya.
- g) Penyaluran siswa untuk mendalami Aqidah akhlak ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.⁶³

4. Ayat al-Qur'an dan hadits yang berkaitan

a. Ayat al-Qur'an

Beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan akhlaq adalah sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya : “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”⁶⁴ (al-qalam:4).

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (al-ahzab ayat 21)⁶⁵

b. Hadits

اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا

Artinya : “ Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya”.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bazzar dari sanadnya anas bin Malik. Dari penjelasan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempunyai keimanan paling sempurna adalah apabila

⁶³ Ibid .

⁶⁴ <http://adinawas.com/ayat-alquran-tentang-akhlaqnamuhhammad.html#ixzz4JfNhhEgV>

⁶⁵ Ali Abdul Halim Mahmud, *Akhlaq Mulia*, Gema Insani, Jakarta, 2004. Hlm. 17

orang tersebut memiliki akhlak yang baik, karena dari akhlak yang baik akan menimbulkan hati yang bersih untuk beribadah dan menambah keimanan seseorang kepada Tuhannya.⁶⁶

D. Penelitian Terdahulu

Sebatas kajian pustaka peneliti, belum ada penelitian yang membahas tentang kebijakan kepala madrasah dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran aqidah akhlaq di Madrasah Aliyah Darul Ulum (MADU) Jaken Pati. Adapun tulisan atau penelitian yang ada diantaranya adalah:

Pertama, Oemar Hamalik yang isinya pengembangan kurikulum mengacu dan melibatkan semua individu secara interaktif dan komunikatif dalam proses pembelajaran agar dapat tercapai hasil belajar yang dapat diamati secara terukur. Pengembangan kurikulum juga dilaksanakan secara sistematis yang memuat semua komponen, lengkap, utuh, menyeluruh, konsisten, dan serasi dengan faktor-faktor yang mendasrinya.⁶⁷

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Kalebbi Al-Kautsar dengan judul “*Model Pengembangan Kurikulum Akidah Akhlak*” (*Studi di MTsN Mulawarman dan MTsN Banjar Selatan 1*). Fokus penelitiannya adalah membahas prosedur pengembangan desain, implementasi, dan evaluasi kurikulum akidah akhlak. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengembangan perencanaan yang berkaitan dengan perencanaan tujuan, pengembangan materi, pengembangan proses, dan prosedur evaluasi berasal dari bahan yang sudah ada. (2) Implementasi yang di dalamnya termuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup adalah berasal dari bahan yang sudah ada. (3) Evaluasi proses, dan hasil, serta alat

⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 21.

⁶⁷ Oemar Hamalik, *Op.Cit.* Hlm 16.

evaluasi Guru akidah akhlak menggunakan alat evaluasi tes dan non tes. Dalam konteks ini, berasal dari bahan yang sudah ada.⁶⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rohyanto, Anda. Harimas tahun 2013 dengan judul Skripsi “*Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter (Studi Kasus Sekolah Dasar Plus Al-Kautsar Malang)*” Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang.

Dalam penelitiannya ditemukan bahwa peran kepala sekolah dalam perencanaan kurikulum berbasis karakter adalah sebagai promotor. Peran kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum berbasis karakter adalah sebagai (1) Manajer yang didalamnya terdapat Peran Interpersonal Peran Informasional dan Pengambil Keputusan, (2) Administrator, (3) Supervisor, (4) Leader, (5) Edukator, (6) Motivator, (7) Inovator.⁶⁹

E. Kerangka Berfikir

Kurikulum dan pembelajaran merupakan salah satu aspek pendidikan pengembangannya dalam era otonom dilimpahkan kepada daerah dan madrasah, tentu saja bagi daerah dan madrasah yang sudah mapan, memiliki kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan kurikulum sendiri, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar.⁷⁰

Berkaitan dengan proses pembelajaran di madrasah, pemerintah sudah membuat kurikulum sedemikian rupa untuk memudahkan proses pembelajaran agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Begitu pula dalam mata pelajaran yang termasuk dalam rumpun PAI. Mulai dari al-Qur’an Hadis, fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam dan Aqidah Akhlaq.

⁶⁸ Al Kautsar, Kalebbi *Model Pengembangan Kurikulum Akidah Akhlak (Studi di MTsN Mulawarman dan MTsN Banjar Selatan 1)*. Tesis, Pascasarjana, 2015. <http://idr.iain-antasari.ac.id/150/>

⁶⁹ Rohyanto, “*Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter (Studi Kasus Sekolah Dasar Plus Al-Kautsar Malang)*” Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, 2013.

⁷⁰ Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Op. Cit.*, hlm. 31.

Meskipun semua mata pelajaran itu sudah ada kurikulum yang ditentukan oleh pemerintah, pihak madrasah pun masih harus mempelajari dan mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di madrasah tersebut. Kurikulum tersebut dikembangkan sesuai dengan tujuan, visi dan misi madrasah sebagai jembatan untuk mempermudah mencapai tujuan. Selain itu, kurikulum dikembangkan untuk menyempurnakan hal-hal terkait dengan mata pelajaran tertentu sehingga peserta didik akan memperoleh hasil yang maksimal dalam proses belajar mengajar.

Sesuai dengan hal tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan pengembangan yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap kurikulum mata pelajaran aqidah akhlaq di Madrasah Aliyah Darul Ulum (MADU) Jaken Pati tahun pelajaran 2015/2016.

Madrasah Aliyah Darul Ulum (MADU) Jaken Pati adalah satu-satunya sekolah ditingkat SLTA yang ada di kecamatan Jaken kabupaten Pati yang merupakan pusat pendidikan lanjutan tingkat atas di kecamatan ini, sehingga peneliti menganggap perlu dilakukannya penelitian terkait dengan kebijakan kepala madrasah dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran aqidah akhlaq di Madrasah Aliyah darul ulum (MADU) Jaken Pati tahun pelajaran 2015/2016.